

**PENERAPAN AKAD *AL-QARDH WAL IJARAH* PADA PRODUK
TALANGAN HAJI PADA PT.BANK SYARIAH MANDIRI
KCP SUNGGUMINASA GOWA**



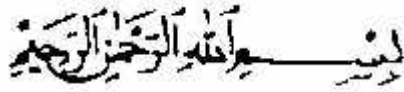
SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Jurusan Ekonomi Islam
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*

Oleh
NURUL FATWA
NIM. 10200110054

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbill'Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam yang selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, penyampai amanah, dan pemberi nasihat kepada umat manusia, serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang istoqomah dan di ridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah pada Produk Talangan Haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa” dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) pada jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan bimbingan berbagi pihak dari mulai periode perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Oleh karena itu, izinkanlah penulis untuk dapat mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berjasa tersebut, antara lain kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda H. Kafrawi Aman Manan, BA dan Ibunda Hj. St. Fachriah, S.Sos yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Terima kasih banyak atas segala kasih sayang, do'a dan Ridho

sehingga penulis selalu termotivasi untuk berusaha menyelesaikan skripsi ini dalam mencapai cita-cita yang penulis inginkan.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag selaku Wakil Dekan bagian akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan waktunya untuk membimbing penulis, mengarahkan, serta memberi masukan kepada penulis.
6. Ibu Rahmawati Muin S.Ag, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekaligus pembimbing II atas kesediaannya memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan-masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam mengurus surat-surat dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada pihak PT. Bank Syariah Mandiri Gowa Ibu HJ. Nur Ulfa, Pak Musliman, kak Eki, kak Opik, kak Amat, Pak Buyung, dan seluruh staf PT. Bank Syariah Mandiri Gowa atas bantuan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih kepada saudara Sinar Januar Muhfar yang senantiasa memberikan motivasi, semangat serta do'a kepada penulis.

10. Terima kasih untuk saudara-saudaraku LASKAR TIK, MIRROR, ZLIEMFAN atas semangat yang selalu tercurah untuk penulis.
11. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku Ayu Ruqayyah Yunus, Andi Nurfuhairah M, Jumriani, Dalilah Zulfani, dan Firdaus Nurlan yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan semangat, membantu, dan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
12. Terima kasih kepada senior-senior yang selama ini memberikan masukan kepada penulis, Mega Octaviany, Rahmat Asri, Titien Ismoyosari, Nurkhadijah Yuniarti Ikhsan, Nurlaila Hasmi.
13. Untuk saudara-saudaraku Fuad Kesuma Fikar, Rika Sari Lestari, Faiz Tri Permana Putra, yang juga telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
14. Untuk teman-teman Ekonomi Islam Suci Wahyuni, Nur Ifna, Nur Ingsih, Nashri Nur, Syamsinar Wahyu, Nurul Amelia, Mutmainnah, Zainal Lintang, Rutrid Zidiq, Syarifuddin dan teman-teman ekonomi Islam angkatan 2010 lainnya yang tidak disebutkan namanya yang telah mendukung, mendoakan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan Muhiddin, Nur Riyana Putri, Wirmadani Nirsyam, Sitti Rifqah Wiranti Danial, Nining, Risman Palancaria dan Annisa Ramadhani yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
16. Terima kasih kepada teman-teman Forum Kajian Ekonomi Syari'ah (FORKEIS).
17. Terima kasih kepada kanda-kanda, serta teman-teman UKM Seni Budaya eSA angkatan XV.
18. Terima kasih kepada teman-teman KKN Profesi Ang. IV UIN Alauddin Makassar Kel. Tamangapa.

19. Terima kasih kepada junior-junior Ekonomi Islam (Nasrullah, Nurbaedah Anwar, Siwi Ayu Pekerti, Nisma, Nurkhaerat Sidang, A.Yunus, Nisrina Munifa Ilham, Nurkhayrah Bakri, Muh. Zulkahfi, Nur Ahmad Awaluddin.)

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan khususnya bagi umat manusia, serta bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Semoga Allah senantiasa meridhoi aktifitas penulis berjuang di jalan-Nya serta menjadikan penulis semua sebagai hamba-Nya yang bahagia di dunia dan akhirat.

Wassalam,

Sungguminasa, 19 Agustus 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-11
A. LatarBelakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12-35
A. <i>Al-Qardh</i>	12
B. <i>Al-Ijarah</i>	21
C. Kerangka Konseptual.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36-40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Metode Pegumpulan Data.....	38
E. Instrumen penelitian.....	39
F. Teknik pengolahan dan Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41-59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Penerapan Akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> dalam Dana Talangan Haji di Bank Mandiri Syariah KCP Gowa	46
C. Problem Penerapan <i>Qardh Wal Ijarah</i> Dalam Dana Talangan Haji dan Analisisnya	54

BAB V PENUTUP.....	60-61
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62-63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Skema Pembiayaan <i>Al-Qardh</i>	21
2.2 Transaksi <i>Ijarah</i> dengan Obyek Manfaat Barang	30
2.3 Transaksi <i>Ijarah</i> dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa	31
2.4 Kerangka Konseptual	36
4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gowa	46

ABSTRAK

Nama : NURUL FATWA
NIM : 10200110054
Judul : Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa

Rumusan masalah pada skripsi ini bagaimana penerapan akad *Qardh Wal Ijarah* pada produk talangan haji serta hambatan dalam produk talangan haji yang dalam hal ini PT. Bank Syariah Mandiri Sungguminasa Gowa. Talangan haji merupakan produk pembiayaan perbankan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan nomor *seat*/porsi haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Qardh Wal Ijarah* pada produk talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam produk talangan haji.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengumpulkan datanya dilakukan dengan cara *interview* (wawancara). Adapun responden dari penelitian ini adalah pimpinan serta karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa serta beberapa nasabah talangan haji, observasi secara langsung maupun tidak langsung pada obyek yang diteliti maupun pengumpulan data dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa menggunakan akad *qardh walijarah*, yaitu dana yang dipinjamkan oleh pihak Bank kepada nasabah calon haji dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah. Waktu pelunasan yang diberikan oleh BSM maksimal 1 tahun dan pelunasannya dengan cara menabung. Apabila terjadi pembatalan pemberangkatan haji dikarenakan tidak bisa melunasi atau nasabah calon haji meninggal dunia, maka dari pihak BSM akan mengembalikan uang nasabah sejumlah yang disetorkan.

Kata Kunci: *Qardh, Ijarah, Talangan Haji*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Abdul Aziz dan Kustini mengemukakan, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban dan harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu (*istitho'ah*) mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian diantaranya:

Pertama, Kemampuan personal (*Internal*), harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain; kesehatan jasmani dan rohani, kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama, khususnya tentang manasik haji.

Kedua, Kemampuan umum (*Eksternal*), harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah yang mencakup antara lain; peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas transportasi dan hubungan antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk ibadah haji baru dapat terlaksana dengan baik dan lancar.¹

Oleh karenanya, tidak semua orang Islam diseru untuk menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 97:



¹Abdul Aziz & Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta; Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007), h.107.



Terjemahnya:

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S.Ali Imran: 97).²

Sanggup mengadakan perjalanan berarti menyangkut kesanggupan fisik, materi, maupun rohani. Ketiganya merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim yang hendak melaksanakan ibadah haji. Bila syarat tersebut belum terpenuhi, maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya. Sanggup juga bisa diartikan orang yang sanggup mendapatkan pembekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan perjalanan pun aman.

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan, untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harus membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), banyak calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada lembaga keuangan syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya, termasuk pengurusan haji dan talangan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH).

Dengan kemajuan perekonomian sekarang ini, seiringan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan, maka banyak lembaga keuangan yang menawarkan berbagai macam produk dan fasilitas yang menarik, dalam hal ini perbankan syari'ah ikut bermunculan untuk

²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h.97.

memberikan layanan dan fasilitas kepada masyarakat. Kedatangan perbankan syariah disambut dengan suka cita oleh berbagai kalangan umat islam, dukungan mereka diwujudkan dengan berdirinya lembaga keuangan syari'ah baik bentuk bank maupun non bank.

Dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 2 menyatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem hukum perbankan di Indonesia bank sebagai *intermediary* bagi masyarakat yang surplus dana dan masyarakat yang kekurangan dana.³

Seiring dengan perputaran waktu, perkembangan Bank Syari'ah mengalami booming pada tahun 1992. Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak melambat, tetapi perbankan syariah di Indonesia terus berkembang. Pada era tahun 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah.⁴ Salah satu Bank Umum yang membuka unit usaha syari'ah adalah Bank Mandiri dengan mendirikan Bank Syariah Mandiri.

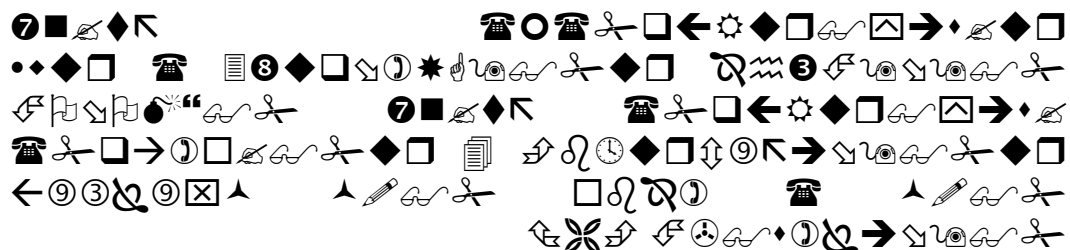
³ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, Cet.ke-1, 2006), h. 7-9.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo, 2004, Edisi Ketujuh), h. 25.

Dengan layanan Syariah, Bank Mandiri Syariah memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk dana talangan haji. Dana talangan haji pada dasarnya dalam rangka mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang bekerjasama dengan Departemen Agama RI berdasarkan Sistem Komputerisasi Terpadu (Siskohat), yaitu suatu sistem yang dirancang untuk alat kontrol, penampungan data dan pengolahan data dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji.

Pembiayaan Talangan Haji BSM merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus, untuk menutup kekurangan dana guna memperoleh kursi/seat haji saat pelunasan BPIH. Pada pembiayaan tersebut menggunakan akad *Qardh wal Ijarah*. *Qardh wal Ijarah* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Secara umum, *Al-Qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik (kuno), *Qardh* bukan merupakan transaksi komersial (mencari keuntungan) melainkan merupakan transaksi yang bersifat *ta'awun* (tolong-menolong). Dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:2)

Bank Syariah Mandiri sudah cukup lama menyelenggarakan ”talangan”. mungkin seorang jamaah ada kendala, uangnya masih belum siap untuk membayar batasan 3.000 dolar AS untuk memperoleh kuota itu, karena saat ini pun untuk haji plus, aturannya diterapkan sama dengan haji reguler. Jadi *first come first serve*. Jadi tidak seperti dulu, siapa yang membayar bisa langsung berangkat sehingga saat ini calon jamaah haji bisa memprogramkan diri kapan bisa berangkat haji. Melalui kerjasama ini nanti calon jamaah haji dapat mencicil dana talangan ini dan sebelum berangkat sudah harus lunas. Jadi seandainya bayar sekarang, naik hajinya tahun depan.

Tahun 2011 Bank Syariah Mandiri telah memiliki pendaftar mencapai 35 ribu pendaftar, selain memberikan layanan tabungan haji reguler, dalam dua tahun terakhir Bank Syariah Mandiri juga melayani nasabah ONH Plus. Hingga saat ini setidaknya terdapat 148 ribu nasabah Bank Syariah Mandiri yang telah mendapat porsi haji hingga 2017. Selain reguler jumlah itu juga termasuk calon jamaah ONH Plus. Bank Syariah Mandiri telah memiliki total aset sebesar 17,7 triliun rupiah. Dengan 314 outlet di 33 provinsi seluruh Indonesia.

Dengan melihat antusiasme masyarakat untuk berhaji sangat besar, peluang bagi Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa untuk meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji. Pembiayaan ini bertujuan membantu

nasabah calon jamaah haji yang belum bisa membayar BPIH sebagai setoran awal untuk mendapatkan *seat*/porsi haji khususnya di wilayah Sungguminasa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah, karena pada hakekatnya implikasi dari produk dana talangan haji tersebut akan bermanfaat dan memudahkan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Maka perlu kiranya untuk melakukan penelitian dengan judul; “Penerapan Akad *Qardh Wal Al-Ijarah* Pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah produk talangan haji dengan akad *al qardh wal ijarah*. Talangan haji adalah pinjaman/pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah untuk mendapatkan nomor porsi haji.

Aplikasi akad *qardh wal ijarah* pada perbankan syariah digunakan untuk produk pembiayaan “Talangan Haji” dimana nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji dimudahkan untuk mendapatkan *seat*/porsi dengan cepat. Produk ini termasuk pembiayaan konsumtif.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang tertera dalam latar belakang bahwa Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa memiliki produk dana talangan haji, maka permasalahan yang diajukan oleh penulis:

1. Bagaimana penerapan akad *qardh* dan *al-ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa di Gowa?
2. Hambatan apa saja yang selama ini dihadapi dalam produk dana talangan haji yang ada di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa di Gowa?

D. Kajian Pustaka/Penelitian Sebelumnya

1. Al-Qardh

Menurut Muhammad Yusuf dan Wiroso dalam bukunya *Bisnis Syariah*, mengemukakan bahwa *Al-qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁵

Menurut Ascarya dalam bukunya *Akad dan Produk Bank Syariah*, mengutip bahwa *Al-qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).⁶

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya uang atau lat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam aplikasinya diperbankan

⁵ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah edisi ke-2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.138.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.46.

syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan talangan kepada nasabah prima untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.⁷

2. *Al-Ijarah*

Menurut Muhammad, dalam bukunya Model-model akad Pembiayaan di Bank Syariah, *Al-ijarah* disebut juga dengan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸ Lalu, M.Syafi'i Antonio mengutip dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik menuturkan, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹

Dalam pengertian lain yang dikutip Ascarya dalam buku Akad dan Produk Bank Syariah, *ijarah* adalah istilah dalam Fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *ijarah* adalah sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.¹⁰

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ana Khoirul Nisak pada tahun 2008, judul “Fasilitas Layanan Tabungan Haji Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Cabang Malang” menjelaskan

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 47.

⁸ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 124.

⁹ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, (cet. ke-1, 2001), h. 117.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 99.

bahwa produk yang dikeluarkan BNI membantu meningkatkan dan mempersiapkan baik jangka panjang atau pendek untuk membantu ONH (ongkos naik haji).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hosriyah pada tahun 2008, judul “Analisis Penerapan Akad *Al-Qardh* Sehubungan dengan Pembiayaan Talangan Haji (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Bangkalan)” menjelaskan bagaimana Produk Talangan Haji bisa diterima dimasyarakat, memudahkan masyarakat untuk berangkat haji. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Laila Agustina pada tahun 2009, judul “Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan *Al-Qardh* Dana Porsi Pemberangkatan Ibadah Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang” menjelaskan bahwa strategi dilakukan dengan mengefektifkan personal *selling* dan *advertising* secara khusus. Strategi meliputi: pembentukan tim yang bertugas membandingkan produk perusahaan dengan produk lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada Produk talangan haji pada lembaga keuangan syariah (LKS) dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun perbedaannya peneliti menggunakan judul “*Penerapan Akad Al-Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa, 2014*” dan akad pembiayaan yang digunakan adalah *qardh* dan *ijarah*. Selain itu Lokasi Penelitian dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *Qardh Wal Ijarah* pada produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam produk dana talangan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui pengertian dari akad *qard wal ijarah* itu sendiri.
- b. Mengetahui bagaimana penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.
- c. Bagi praktisi bank, dapat mengetahui tingkat perkembangan produk tabungan haji supaya kedepannya dapat lebih ditingkatkan dan disosialisasikan terhadap masyarakat.
- d. Bagi Departemen Agama RI, diharapkan dapat terus bekerjasama dengan Bank untuk menyalurkan masyarakat yang ingin naik haji dengan cara menabung.
- e. Bagi masyarakat, memberikan informasi dan memudahkan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai uang banyak.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Al Qardh*

1. Pengertian *Al-Qardh*

Definisi *qardh* dalam bahasa Arab berarti pinjaman.¹ Secara terminologi muamalah (*ta'rif*), *qardh* adalah memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama.² Jadi *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *Al-qardh* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.³

Menurut Ahmad asy-Syarbasyi yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathaawun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁴

Al-qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.⁵

¹ Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 592.

² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 137.

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 174.

⁴ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), h. 131.

⁵ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.138.

Definisi yang berkembang di kalangan fuqaha, *Al-Qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya”, atau dengan pengertian lain, “suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *misliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya⁶. Harta *misliyat* merupakan harta yang mempunyai persamaan atau padanan dengan tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara satu dengan lainnya dalam kesatuan jenisnya, biasanya berupa harta benda yang dapat ditimbang, ditakar, diukur atau dihitung kuantitasnya.

Menurut istilah *qardh* adalah harta yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian sipeminjam akan mengembalikannya setelah mampu, sedangkan mazhab Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat, diperbolehkan melakukan *qardh* atas semua harta yang bisa dijualbelikan obyek salam, baik itu ditakar atau ditimbang, seperti emas, perak dan makanan atau dari harta yang bernilai, seperti barang-barang dagangan, binatang dan sebagainya. Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan. *qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Bank terbatas hanya

⁶ Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 170-171.

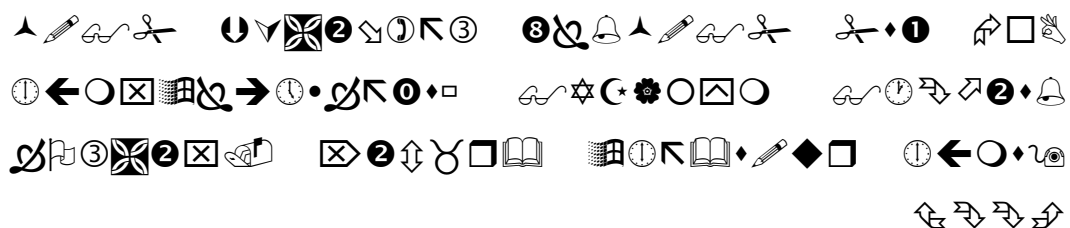
dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja.⁷

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁸ Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁹

2. Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan *ijma'* ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

a. Al-Qur'an



Terjemahnya:

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan

⁷ Widyarningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), h.59.

⁸ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, h.171.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), h.223.

Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadiid:11)¹⁰

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹¹

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qardh* adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Muzzammil, ayat 20

□•Terjemahnya:

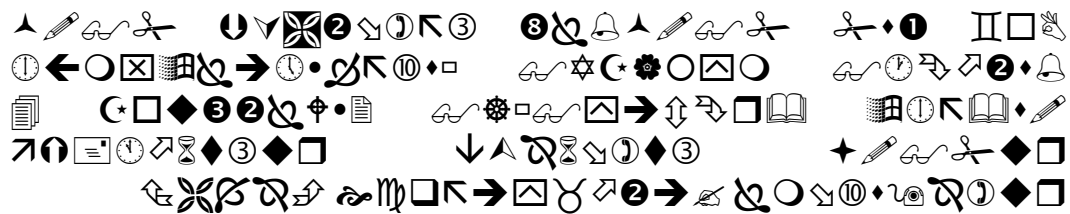
“Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007), h. 902.

¹¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), h.132.

dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Muzzammil: 20)¹²

2. Surah Al-Baqarah, ayat 245



Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS.Al-Baqarah: 245).¹³

3. Surah Al-Baqarah, ayat 280



Terjemahnya:

“Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 280).¹⁴

b. Al-Hadits

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 989.

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 60.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 70.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya:

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW, berkata, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR. Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

مَالِكٍ قَالَ قَالَ بَعْشَرُ أَمْنَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ
يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ
وَ عِنْدَهُ وَ الْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْحَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ

Artinya:

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, "Aku melihat pada waktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, 'Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?' Ia menjawab, 'Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan,'" (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *Al-qardh* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Ada beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan utang-piutang:

Pertama, akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya, apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain, maka barang tersebut terlepas dari pemilikan *Muqridh* (orang yang menghutangi), dan *Muqtaridh* (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual-beli, hibbah, dan hadiah. Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan ditempat akad berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian. Ketiga, pihak *muqtaridh* wajib melunasi hutang dengan barang sejenis jika obyek hutang adalah barang *al-misliyyat*, atau dengan barang yang sepadan (senilai) jika obyek hutang adalah barang *al-qimiyyat*. Ia sama sekali tidak wajib melunasi hutangnya dengan *'ain* (barang) yang dihutangnya. Pada sisi lain pihak *muqridh* tidak berhak menuntut pengembalian *'ain* (barang) yang dihutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemilikannya. Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak *muqridh* tidak berhak menuntut perlunasan sebelum jatuh tempo. Sedang apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, menurut Fuqaha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Kelima, ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtaridh* belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak *muqridh* berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak *muqtaridh* menyegerakan pelunasan hutang, karena bagaimanapun juga hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat *Al-Qardh*

Ketentuan *al-qardh* menurut fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001.¹⁶

Rukun *al-qardh* adalah:

- a. Peminjam/*Muqtaridh*
- b. Pemilik dana atau pemberi pinjaman/*Muqridh*
- c. Jumlah dana/*Qardh*
- d. *Ijab Qabul/Shighat*¹⁷

¹⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.174-175.

¹⁶ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 109.

Syarat *Al-qardh* adalah:

- a. Kerelaan dua pihak melakukan akad.
- b. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Pembiayaan *Al-Qardh*

Berikut ini akan dipaparkan ketentuan-ketentuan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) tentang Pembiayaan *Al-Qardh*.¹⁸

a. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

Ketentuan pembiayaan *Al-Qardh Al-Hasan* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000. Dalam fatwa ini, ketentuan umum *Qardh* adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al-qardh* wajib menegembalikkan jumlah pokok yang diterima yang telah disepekatai bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan pada nsabah.
- 4) Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *qardh* dapat memberikan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

¹⁷ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 140.

¹⁸ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 110.

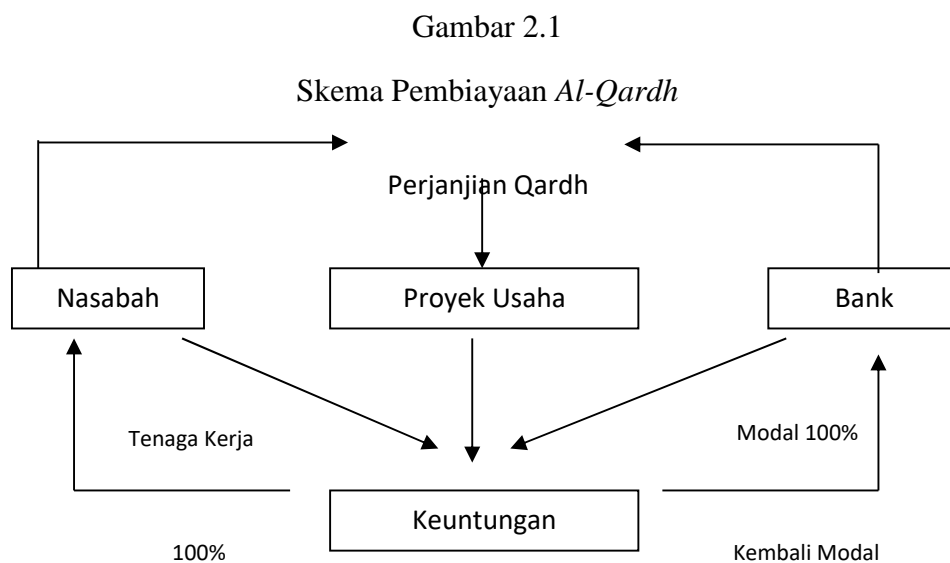
¹⁹ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 110.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan pada waktu yang disepakatai dan bank sudah memastikan ketidakmampuannya, bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b. Sanksi

Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagai mana dimaksudkan butir dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Secara umum, *Al Qardh* dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Sumber: Antonio, 2001

Pada skema pembiayaan *Al-Qardh* di atas, dijelaskan bahwa pihak pertama dalam hal ini bank memberikan modal usaha kepada pihak kedua dalam hal ini nasabah untuk kemudian memanfaatkan modal tersebut dengan sebaik mungkin. Pihak bank kemudian mengawasi bagaimana pengelolaan modal usaha tersebut yang nanti jika mendapatkan keuntungan pihak bank dan nasabah kemudian membagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Yang nantinya pihak bank akan mendapatkan modalnya kembali dan nasabah akan mendapatkan keuntungannya.

5. Aplikasi *Al-Qardh* dalam perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:²⁰

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau untuk membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank.
- e. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bias menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito. Pengurus bank akan mengembalikan secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

6. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:²¹

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

²⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007), h.76.

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), h.134.

- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

B. Al-Ijarah

1. Pengertian Al-Ijarah

Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa.²² *Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain.²³ Dalam pengertian lain, *ijarah* dari *ujrah* yang berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu.²⁴

Menurut Rawas Qal'aji yang dikutip oleh Syafi'i Antonio, *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁵

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang

²² Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h.109.

²³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), h.29.

²⁴ Moh.Rifa'i et al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), h. 224.

²⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001) h.117.

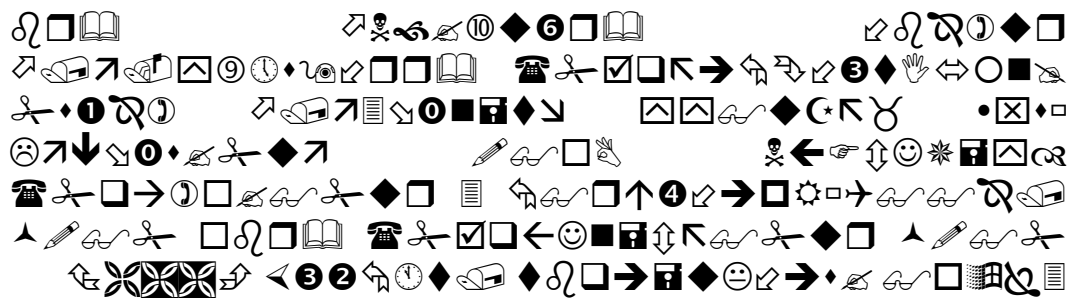
disewakannya.²⁶ Sedangkan, *ijarah* dalam konteks perbankan syariah adalah suatu *lease contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan baik dalam bentuk sebuah bangunan maupun barang-barang, seperti mesin-mesin, pesawat terbang dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.²⁷

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut:

- Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
- Menurut fuqaha Syari'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.²⁸

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an



Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah:233).²⁹

²⁶ Muhammad Yusuf, Wiroso, *Bisnis Syariah Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.117.

²⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2008), h. 43-44.

²⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.182.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h.57.

b. Al-Hadist

عِيْلَ وَهَيْبَ
اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ

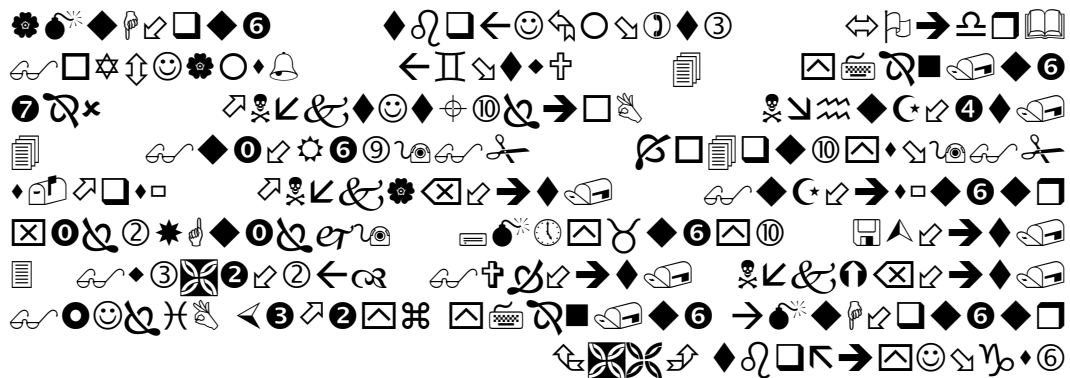
أَبِيهِ
عَلَيْهِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”
(HR.Bukhari)

3. Dasar Hukum Ijarah

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *al-ijarah* adalah firman Allah.

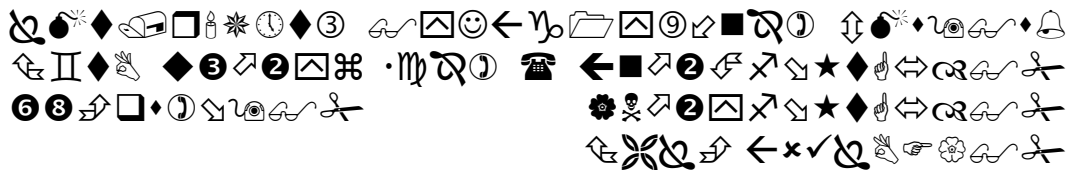


⇔ Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32).³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h.798.

Allah berfirman:



Terjemahnya:

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash: 26).³¹

Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah:



Terjemahnya:

"...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya." (QS. At-Thalaq: 6).³²

Para ulama fikih juga mengemukakan alasan Sabda Rasulullah,

عَرَفْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجْرَ هَذَا جِيرًا عَطُوا

Artinya:

"Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya." (HR.Abu Ya'la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tarmidzi).

4. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa).

Rukun *ijarah* adalah: ³³

³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h.613.

³² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h.946.

³³ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah* Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.118.

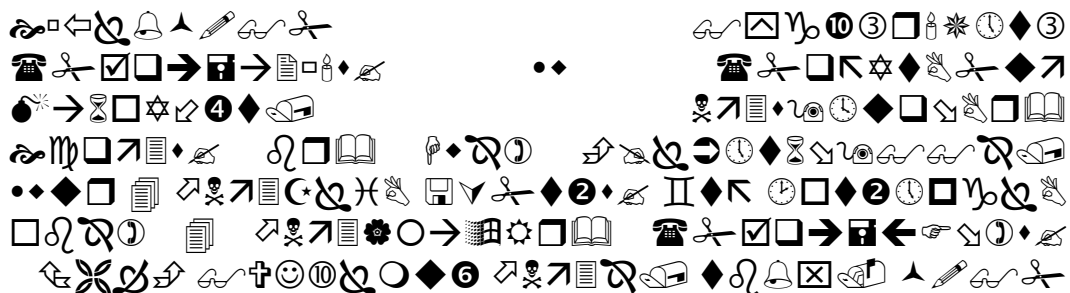
- a. *Musta'jir*/penyewa
- b. *Mu'ajjir*/pemilik barang
- c. *Ma'jur*/barang atau objek sewaan
- d. *Ajran* atau *Ujrah*/harga sewa atau manfaat sewa
- e. *Ijab Qabul*

Syarat-syarat *ijarah* adalah:³⁴

- a. Pihak yang terlibat harus saling ridha
- b. *Ma'jur* (barang/objek sewa) ada manfaatnya:
 - 1) Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal
 - 2) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan
 - 3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - 4) *Ma'jur* wajib dibeli *Musta'jir*

Adapun syarat akad *ijarah* ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang tersebut belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah:



³⁴ Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah* Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.119.

Terjemahnya:

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka...*” (QS. An-Nisa: 29).³⁵

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.
- f. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- g. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.³⁶

5. Sifat Akad *Ijarah*³⁷

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia, tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris.

Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.

6. Macam-Macam *Ijarah*³⁸

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h.122.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

³⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.234.

³⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 236.

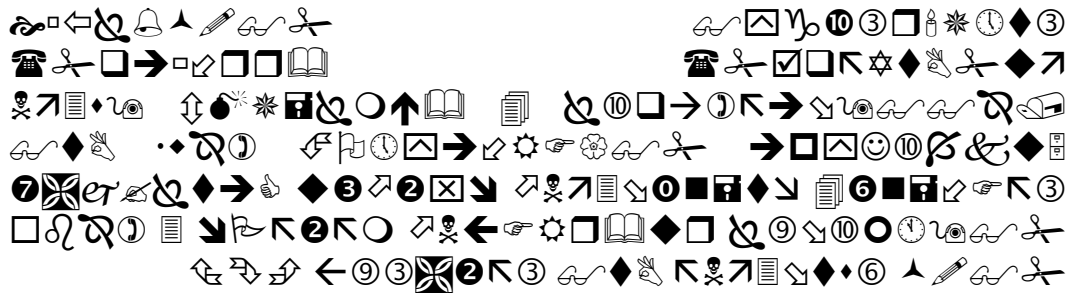
- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat probadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.

7. Sistem Transaksi *Ijarah*

Dalam sistem transaksi ini yang akan di bahas ialah mengenai tatacara bagaimana manusia melakukan transaksi sewa menyewa yang dikehendaki, yang sesuai dengan syariat Islam. Dimana didalamnya terdapat berbagai peraturan yang harus dipatuhi seperti, syarat-syarat dan rukunnya. Sebab sebagai suatu transaksi umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Seperti telah dijelaskan pada pengertian *ijarah* yang lalu, yakni dimana sistem transaksi ini adalah sistem transaksi ini adalah sistem yang menggunakan akad (kontrak) dalam suatu pengertian manfaat, maka agar lebih mudah dipahami bahasannya, alangkah lebih baiknya penulis terangkan dahulu apa yang dinamakan dengan kontrak (akad) itu.

Kontrak atau perjanjian adalah akad yang secara harfiah berarti iakatan atau kewajiban, maksudnya mengadakan ikatan untuk persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam salah satu waktu. Artinya ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah: 1).³⁹

Ayat di atas menyatakan janji-janji (perjanjian dan lafaz *uqud*) dimana *uqud* disini lebih bersifat komprehensif sebab menyatakan *uqud* pada *huqud* Allah. *Uqud* ini mempunyai banyak konotasi dibanding kontrak atau perjanjian pada hukum umum. Jadi dari segala macam hukum yang terjadi harus senantiasa dipenuhi, mengikuti pada lafaz *uqud* yang diperintahkan oleh Allah.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan transaksi *ijarah* ini, haruslah memperhatikan sejumlah dalil maka fuqaha merumuskan rukun sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.⁴⁰ Berikut adalah skema transaksi *ijarah* dengan obyek manfaat barang dan skema transaksi dengan obyek manfaat jasa, adapun yang terkait adalah: *mustajir* (penyewa), *mu'ajir* (pemilik

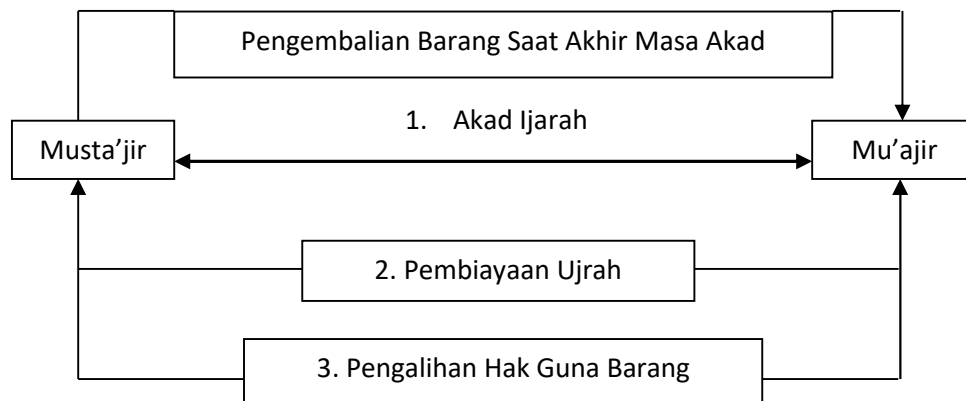
³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 156.

⁴⁰ Hamzah Yakub, *Fikih Muamalah: Kode Etik Dagang menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h.320.

barang), barang yang dapat diambil manfaatnya, atau jasa yang dapat diambil tenaganya serta akad *ijarah*.

Gambar 2.2

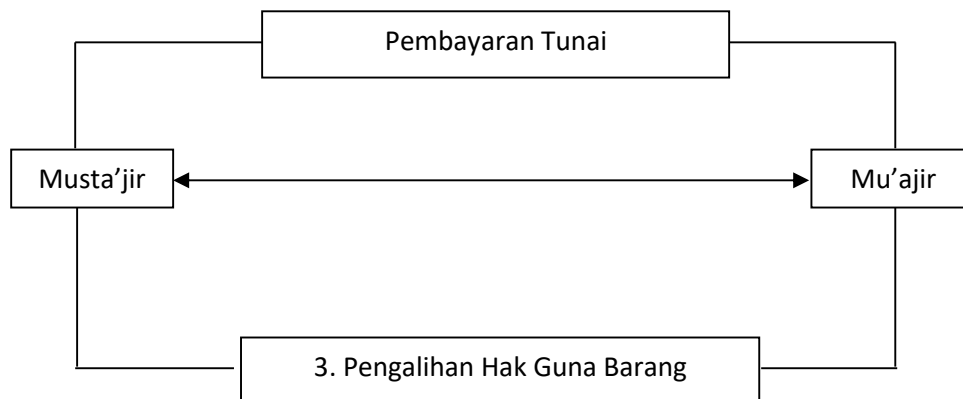
Skema Transaksi *Ijarah* Dengan Obyek Manfaat Barang



Sumber: Hamzah Ya'kub, *Fiqh Muamalah*, 1992

Gambar 2.3

Skema Transaksi *Ijarah* Dengan Obyek Manfaat Tenaga/Jasa



Sumber: Hamzah Ya'kub, *Fiqh Muamalah*, 1992

Keterangan:

- a) Akad *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir* (penyewa) kepada *mu'ajir* (pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga, jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa.
- b) Pembayaran ujah dilakukan oleh *musta'jir* sebagai penyewa barang kepada *mu'ajir* sebagai pemilik barang,
- c) *Mu'ajir* menyerahkan barang kepada *musta'jir* untuk digunakan dan diambil manfaatnya.
- d) Setelah berakhir masa sewa maka *musta'jir* mengembalikan barang yang telah digunakan kepada *mua'jir*.

Sedangkan dalam skema transaksi *ijarah* dengan obyek manfaat tenaga/jasa:

- a) Akad *ijarah* dilakukan oleh *musta'jir* (penyewa) kepada *mua'jir* (pemilik barang) untuk membicarakan perihal, spesifikasi harga jangka waktu penyewaan atas barang yang akan disewa.
- b) *Musta'jir* melakukan pembayaran secara tunai kepada *mua'jir*.
- c) Kemudian menyerahkan pengalihan penggunaan hak guna kepada *musta'jir*.

8. Tanggung Jawab Orang yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak? Jika tidak, maka tidak perlu diminta pengantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia

harus mempertanggungjawabkannya, apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak, dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak disengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti rugi.

9. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Pada prinsipnya *ijarah* merupakan akad yang mengikat (lazim) kedua belah pihak yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing pihak harus yang melakukannya. Artinya ketika akad terjadi, masing-masing serta tidak boleh membatalkannya (fasakh) kecuali ada hal-hal yang menurut ketentuan hukum (syara') dapat dijadikan alasan pembatasan. Adapun hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya akad *ijarah* adalah:

- a. Salah satu pihak meninggal dunia. Ini merupakan pendapatan ulama mazhab Hanafi bagi mazhab ini, waris hanya berlaku pada sesuatu yang ada (wujud fisiknya) dan menjadi hak milik. Sementara, manfaat yang diperoleh dari *ijarah* adalah sesuatu yang terjadi secara bertahap dan ketika meninggalnya salah satu pihak manfaat tersebut tidak ada (ma'dum) dan

tidak sedang dimilikinya. Sesuatu yang dimiliki mustahil bisa diwariskan. Oleh karena itu, akad *ijarah* harus diperbahurui dengan ahli waris, sehingga akad berlangsung dengan pemiliknya (yang baru). Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena menurut jumhur ulama manfaat salah seorang yang berakad, karena menurut jumhur ulama manfaat itu boleh diwariskan dan *ijarah* dengan jual beli, yaitu meningkat kedua belah pihak.

- b. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan seperti rumah terbakar atau mobil hilang.
- c. Menurut ulama Hanafiyyah, apabila ada *udzur* dari salah satu pihak seperti rumahnya disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijarah* batal. *Udzur-udzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah* itu menurut ulama Hanafiyyah adalah, salah satu pihak mengalami kepailitan, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, *udzur* yang dapat membatalkan akad *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.
- d. Berakhir dengan *'ikolah*, yaitu pembatalan akad atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* merupakan akad

pertukaran (*mu'awadloh*) harta dengan harta. Oleh karena itu diperbolehkan adanya '*ikolah* sebagai mana dalam jual beli.⁴¹

- e. Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah*, apabila yang disewakan itu rumah, maka itu dikembalikan kepada pemiliknya dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upah.⁴²

Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang bergerak, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada harta si penyewa).

10. Hikmah *Ijarah*

Bentuk sewa menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syariat Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uangnya yang terbatas, misalnya menyewa rumah, sementara pihak yang lainnya memiliki kelebihan rumah dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi kebutuhan lainnya.

Tidak semua orang dapat membeli kendaraan karena harganya yang tak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat menikmati kendaraan tersebut dengan cara menyewa. Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat

⁴¹ Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Mustahabat Al Iqtishodiyah fi Al-Lughot Al-Fugoha* (al-Ma'had' Ali lil Al-Fikri Al-Islamy, 1995) h.354.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.660.

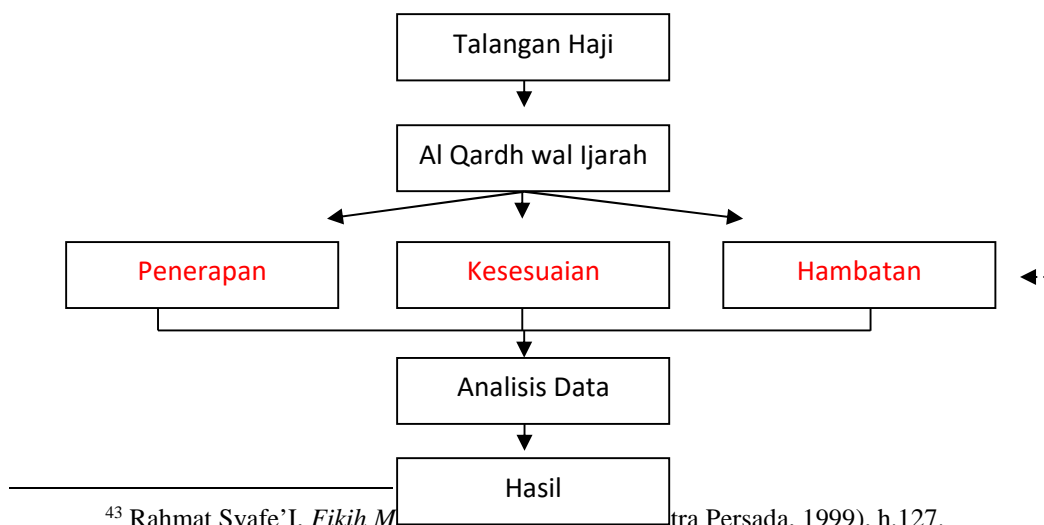
diselesaikan sendiri, karena terbatasnya tenaga dan keterampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan dimana kita mesti menyewa tenaga buruh yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut.⁴³

C. Kerangka Konseptual

Penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sehubungan dengan pembiayaan talangan haji pada bank syariah mandiri KCP Sungguminasa. penelitian ini akan menganalisis dan pengambilan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dari bank. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis diharapkan dapat mengetahui bagaimana penerapan akad *al-qardh* dan *al-ijarah* sehubungan dengan pembiayaan talangan haji serta bagaimana kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4

Kerangka Konseptual



⁴³ Rahmat Syafe'I, *Fikih Muamalah*, (Graha Pustaka Persada, 1999), h.127.

PT. Bank Syariah Mandiri memiliki produk pembiayaan talangan haji, dimana produk ini memberikan solusi untuk memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji. Produk talangan haji menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah*, akad ini kemudian diteliti bagaimana penerapannya pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa Gowa, lalu disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI, serta apa saja hambatan yang ada pada produk ini. Kemudian dilakukan analisis data, data yang didapat kemudian diolah untuk mendapatkan hasil dari yang diteliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini diadakan di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

2. Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Gowa. Tempat penelitian dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri KCP Gowa Jl. KH. Wahid Hasyim No. 244 Sungguminasa.

Pemilihan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa sebagai objek penelitian dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. Permohonan pembiayaan dana talangan haji PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa semakin meningkat.

¹ Lexy Moeloeng J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.114.

- b. Penggunaan dua akad, *Al-qardh* dan *Al-ijarah* atau yang dikenal dengan *Qardh wal Ijarah* bisa menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

B. Pendekatan Penelitian

Seperti yang diketahui, penelitian ini mengambil metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mendeskripsikan tentang objek dengan mencatat apa yang ada dalam objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian. Dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian. Yang dimaksudkan mengetahui informasi terkait manajemen pembiayaan dana talangan haji yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri pada nasabah (Calon Jamaah Haji).

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang sudah peneliti olah sendiri dengan sebagai Pengurus pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa. Data primer yang diperoleh peneliti terkait dengan jumlah dana talangan yang disediakan oleh BSM, biaya administrasi, jumlah nasabah, alur atau prosedur pengajuan pembiayaan dana talangan haji, bentuk promosi pembiayaan ini, batas waktu pembayaran dana talangan , dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber media misalkan: Internet, buku atau dokumen-dokumen laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

Data sekunder yang diperoleh peneliti diantaranya; literatur-literatur yang terkait dengan pembiayaan pada bank syariah, website yang disediakan bank, yaitu: www.syariahamandiri.co.id., dokumen-dokumen atau data yang terkait dengan dana talangan haji di BSM KCP Sungguminasa, seperti: Brosur-brosur, formulir permohonan pembiayaan, akad yang digunakan, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh data dengan meneliti dan mempelajari literatur-literatur terkait dengan pembiayaan perbankan, karya ilmiah, dan sumber-sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori diantaranya; Teori perbankan syariah, manajemen pembiayaan bank syariah, Produk penyaluran dana pada bank syariah, pengertian talangan haji, prinsip *Qardh* dan *Ijarah*, Ibadah Haji dalam sorotan Publik, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pengurusan haji, dan lain sebagainya.

2. Wawancara

Interview alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber

informasi.² Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti kepala cabang bank, karyawan bank dan *customer service* di Bank Syariah Mandiri KCP Sungguminasa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, notulen rapat, prasasti, agenda, surat kabar, majalah. Dan lain sebagainya. Peneliti mendapatkan data seperti formulir permohonan dana talangan pada BSM, brosur-brosur, formulir persyaratan bagi nasabah calon jamaah haji, surat-surat yang harus serahkan oleh pemohon (Jaminan), catatan mengenai persyaratan pengajuan talangan dari *Account Officer* BSM KCP Sungguminasa, dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian *tape recorder* (alat perekam), dimana setiap akan melakukan penelitian atau wawancara penulis menggunakan instrumen ini untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Selain itu instrumen penelitian yang dibutuhkan adalah data-data mengenai produk talangan haji yang ada pada Bank Syariah Mandiri.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengaturan data, pengorganisasian yang mengarah kepada suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis data.

² Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet ke-8, 2010(Jakarta: Rineka Cipta), h. 165.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau kategori.

Ketiga aktifitas dalam analisis data tersebut memperkuat penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti karena sifat data dikumpulkan dalam bentuk laporan, uraian dan proses untuk mencari makna sehingga mudah dipahami keadaannya baik peneliti sendiri maupun orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri Gowa Saat Ini

1. Latar Belakang Pendirian Bank Syariah Mandiri Gowa

PT. Bank Syariah Mandiri Gowa berada di bawah naungan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar sejak tahun 2011. Dengan kehadiran Bank Syariah Mandiri Gowa, diharapkan kinerja dan optimalisasi di bidang perbankan dapat terwujud. Khususnya untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Gowa bertransaksi, baik membuka rekening, transfer, kliring, pembiayaan dan pendanaan, dan lain-lain. Yang beroperasi selama hari kerja, yakni hari Senin s/d Jum'at mulai jam 8.00 s/d 16.00 WITA.¹

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi dari Bank Syariah Mandiri Gowa. Visi sejak berdirinya sampai tahun 2013 adalah **“Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”**. Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dan konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.

¹ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013

- d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.²

Namun, pada proses penelitian ini ternyata ada perubahan di awal tahun 2014 visi tersebut diatas berubah menjadi “**Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia**”. Selanjutnya visi ini dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- b. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- c. Mengembangkan manajemen talenta dalam lingkungan kerja yang sehat.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- e. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.³

3. *Shared Values*

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang disepakati bersama untuk di-*shared* oleh seluruh pegawai Bank Mandiri Syariah yang disebut *Shared Values* Bank Mandiri Syariah. *Shared values* BSM yang disingkat “ETHIC” yaitu:

- a. *Excellence*, berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.
- b. *Teamwork*, mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

² PT. Bank Syariah Mandiri, *BukuProfil PT Bank Syariah Mandiri* 2013. h. 2.

³ PT. Bank Syariah Mandiri, *BukuProfil PT. Bank Syariah Mandiri* 2014. h. 2.

- c. *Humanity*, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan religius.
- d. *Integrity*, menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.
- e. *Customer Focus*, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Mandiri Syariah sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

4. Lokasi Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Gowa

Lokasi kantor PT. Bank Syariah Mandiri Gowa terletak di Jl. KH.Wahid Hasyim No.244 Sungguminasa.⁴

5. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gowa terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

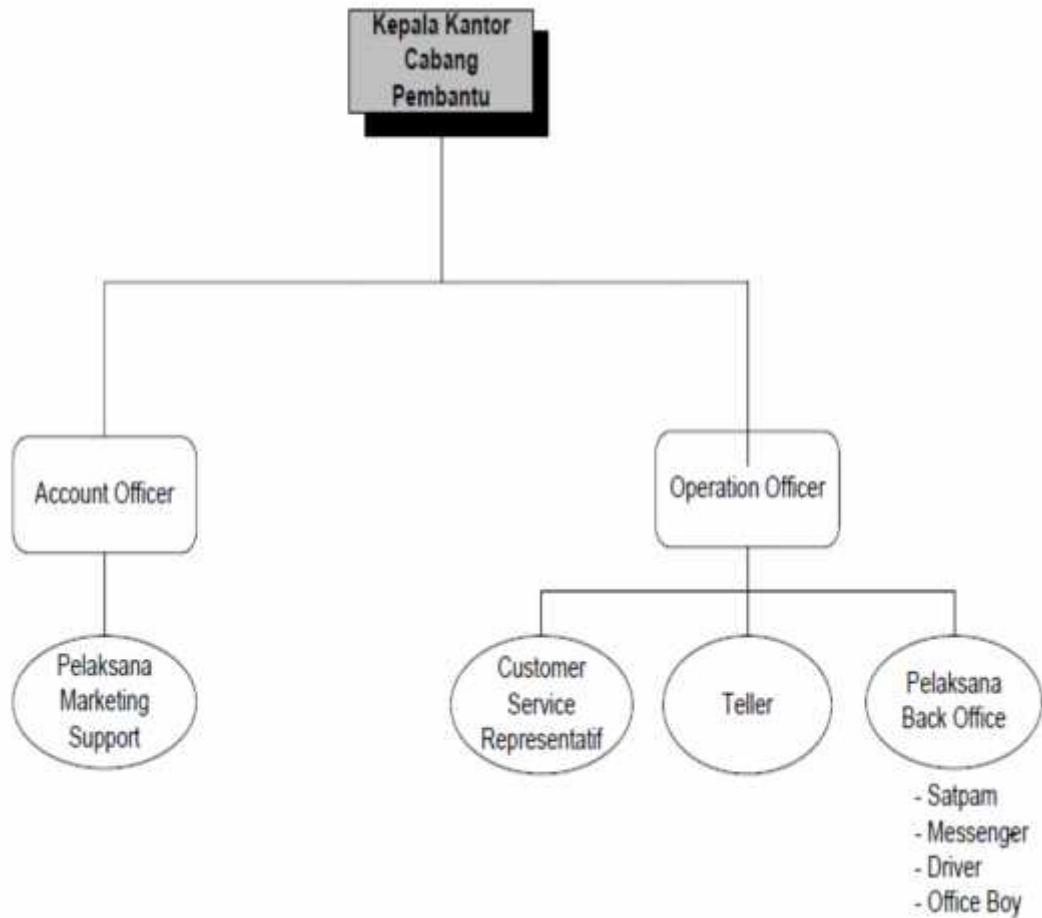
- 1) Pimpinan
- 2) Operation Officer
- 3) Pelaksana Marketing Support
- 4) CSR
- 5) Teller
- 6) Back Office⁵

Adapun gambaran struktur organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gowa sebagai berikut:

⁴ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013

⁵ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gowa



Sumber : Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa

b. Uraian Tugas

Adapun tugas pokok dari masing-masing unit pada organisasi PT. Bank Syariah Mandiri Gowa adalah sebagai berikut:

1) Kepala Cabang

Kepala Cabang bertugas mengelola operasional Cabang berdasarkan sistem syariah secara efektif dan efisien untuk tercapainya:

- a) Target operasional yang meliputi penghimpunan dana; penyaluran pembiayaan; jasa-jasa; hasil usaha; dan Kualitas Aktiva Produktif.
- b) Pemberian pembiayaan yang aman, sesuai kebutuhan nasabah dan menghasilkan.
- c) Pelayanan yang prima kepada nasabah (*customer satisfaction*).⁶

2) Pelaksana *Marketing Support*

Pelaksana *Marketing Support* bertugas:

- a) Terlaksananya kegiatan pemasaran produk dan jasa-jasa bank kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- b) Tercapainya target operasional yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang.
- c) Tercapainya pelayanan yang prima kepada nasabah maupun investor.⁷

3) *Operation Officer*

Operation Officer bertugas:

- a) Mengelola pengadministrasian dan pelaporan transaksi di Kantor Cabang serta pelaksanaan pekerjaan teknis sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- b) Terpenuhiya kebutuhan pegawai sesuai kondisi Cabang.
- c) Terlaksananya pengembangan karir pegawai sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan pegawai yang bersangkutan.⁸

4) *Back Officer*

Back Officer bertugas:

- a) Pembinaan pembiayaan yang aman dan sesuai kebutuhan nasabah.

⁶ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013.

⁷ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013.

⁸ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013.

- b) Tercapainya target operasional yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang.
- c) Terciptanya pelayanan yang prima kepada nasabah maupun investor.⁹

5) *Teller*

Teller bertugas:

- a) Terselenggaranya pelayanan bidang kas secara benar dan cepat.
- b) Terkelolanya persediaan uang tunai secara efektif dan efisien.
- c) Tercatatnya (dibuku) secara benar mutasi kas.¹⁰

6) *Pelaksana Customer Service*

Pelaksana Customer Service bertugas:

- a) Terselenggaranya pemasaran produk Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat.
- b) Terselenggaranya kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada nasabah maupun investor.¹¹

B. Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah dalam Dana Talangan Haji di Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa Gowa

Sesuai dengan visinya "menjadi bank syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha" mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan mampu bersaing dengan bank-bank yang ada. Bank Syari'ah Mandiri telah membuka Produk Pembiayaan Talangan Haji sebagai salah satu upaya untuk membantu nasabah yang mengalami kendala dalam perencanaan pelaksanaan ibadah hajinya.

⁹ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013.

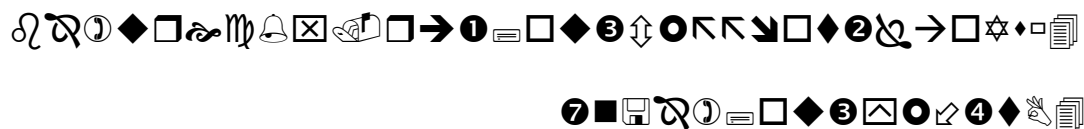
¹⁰ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013.

¹¹ Dokumen PT. Bank Syariah Mandiri Gowa, terbaca tanggal, 29 Agustus 2013.

Di Bank Mandiri Syariah terdapat produk pembiayaan yang diperuntukkan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji yaitu produk dana talangan haji. Produk dana talangan haji adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji.

Opini dari Dewan Pengurus Syariah (DPS) mengenai dana talangan haji yaitu: “Pada prinsipnya kewajiban ibadah haji hanya dibebankan kepada orang yang mampu, sehingga tidak diperkenankan berhaji dengan cara berhutang apabila tidak sanggup membayar, tetapi apabila ia mampu untuk melunasi hutangnya maka diperkenankan berhaji dengan cara berhutang.”¹²

Dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk saling tolong menolong antar sesama yang sedang dalam kesulitan. Dana talangan haji ini digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam menunaikan ibadah haji meskipun belum mempunyai cukup uang untuk melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 280:



Terjemahnya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan...” (QS.Al-Baqarah: 280).

Ketentuan tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah diatur dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.¹³ Untuk bisa

¹² Brosur produk dana talangan haji BSM

¹³ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006, hlm. 171

mendapatkan dana talangan haji di BSM, nasabah calon haji harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Foto copy suami istri
- b. Kartu Keluarga
- c. Surat nikah suami istri¹⁴

Untuk wirausaha dan perorangan, persyaratannya yaitu identitas diri dan pasangan, kartu keluarga dan surat nikah, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan. Sedangkan untuk badan usaha, persyaratan yang harus dipenuhi berupa adanya akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance tahun terakhir, rencana usaha 12 bulan yang akan datang, data obyek pembiayaan.¹⁵

Mengenai proses transaksi Pembiayaan Talangan Haji tersebut relatif cepat dan mudah, yaitu dengan prosedur di bawah ini:

1. Nasabah datang ke BSM untuk mengajukan Pembiayaan Talangan Haji.
2. Nasabah membuka rekening Tabungan Mabrur BSM.¹⁶

Sasaran mitra dan nasabah produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri yaituseperti KBIH, Komunitas Pengajian, PNS, Puskesmas, Kepala Sekolah, Tokoh Agama dan orang-orang yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Dengan adanya

¹⁴ Brosur dana talangan haji di BSM KCP Sungguminasa.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Arif Wirabuana selaku Pelaksana Marketing Support di BSM KCP Sungguminasa, 22 Mei 2014.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Arif Wirabuana, 22 Mei 2014.

produk ini, diharapkan masyarakat khususnya orang Muslim akan lebih mudah menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji.¹⁷

Untuk memudahkan agar masyarakat mengetahui adanya produk talangan haji di Bank Syariah Mandiri, pihak bank kemudian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait instansi untuk memperkenalkan produk talangan haji.¹⁸

Mengacu dari penjelasan di atas, penerapan akad *qardh* sangat cocok diterapkan pada produk pinjaman. Akad *qardh* yang diterapkan pada produk dana talangan haji yaitu berupa pinjaman dana dari pihak BSM kepada nasabah. Pinjaman tersebut berupa dana talangan haji, namun Bank Mandiri Syariah hanya bisa memberikan talangan haji sebesar Rp.22.500.000,00. Untuk mendapatkan nomor porsi haji, nasabah harus mempunyai saldo direkeningnya sebesar Rp.25.000.000,00. Karena dari pihak BSM hanya bisa memberikan dana talangan sebesar Rp22.500.000,00, maka kekurangannya ditanggung nasabah sendiri hingga terpenuhi sampai Rp.25.000.000,00. Pinjaman dana tersebut digunakan untuk pendaftaran haji melalui *on line* dengan SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi haji.

SISKOHAT atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu adalah sistem yang tersambung (*on line*) dengan Bank Penerima Setoran ONH, 27 Kanwil Departemen Agama Propinsi, 6 Daerah Embarkasi dan Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji secara menyeluruh dan terpadu sejak masa

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Arif Wirabuana, 21 Mei 2014.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Arif Wirabuana, 21 Mei 2014.

pendaftaran, penyelesaian administrasi dokumen serta pada operasional di Embarkasi dan Arab Saudi.

Kelebihan dari sistem SISKOHAT antara lain dapat memberikan kepastian kepada calon haji dan mampu mencegah terjadinya “*overquota*” Disamping itu, SISKOHAT mampu memberikan informasi dengan cepat, tepat dan akurat, baik untuk kepentingan manajemen, jamaah haji maupun masyarakat umum lainnya.¹⁹

Bank Mandiri Syariah adalah salah satu Bank Penerima Setoran ONH yang bekerjasama dengan DEPAG untuk melayani pendaftaran haji melalui SISKOHAT. Sistem IT yang dimiliki BSM sudah tersambung (*online*).

Mengacu dari pernyataan diatas, aplikasi akad *ijarah* juga cocok diterapkan pada produk pembiayaan/pinjaman. Akad *ijarah* yang diterapkan pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa upah sewa sistem IT BSM yang tersambung (*online*) dengan SISKOHAT yang digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran nasabah calon haji.

Pendaftaran melalui SISKOHAT dilakukan setelah saldo nasabah mencapai Rp 25.000.000,00 dan biaya sewa sistem IT tersebut dibebankan kepada nasabah. Jadi dalam produk dana talangan haji di BSM menggunakan perpaduan akad *qardh* dengan *ijarah*, yaitu pinjaman atau talangan dana dari pihak Bank untuk bisa mendaftar haji dengan biaya ujrah/sewa yang dibebankan kepada nasabah berupa upah sewa sistem IT yang dimiliki BSM.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Bunga Rampai Perhajian*, Jakarta: Depag RI, 1998, h.22-23.

Sesuai ketentuan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 29/DSNMUI/VI/2002 yang berbunyi:

- a. Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSNMUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.²⁰

Adapun langkah-langkah pendaftaran haji dengan menggunakan dana talangan haji di BSM sebagai berikut:

- a. Nasabah calon haji pergi ke BSM untuk mengajukan permohonan dana talangan haji dengan mengisi form pendaftaran.
- b. Melakukan proses akad yang disepakati bersama antara pihak Bank dengan nasabah
- c. Setelah saldo di rekening mencapai Rp 25.500.000 calon haji dapat ke DEPAG, untuk meminta no SPPH.

²⁰DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h. 176.

- d. SPPH dari DEPAG dibawa kembali ke Bank dan didaftarkan melalui SISKOHAT untuk mendapatkan porsi haji.
- e. Hasil inputan SPPH berupa BPIH.
- f. BPIH tersebut dikembalikan lagi ke DEPAG untuk daftar ulang oleh Bank (khusus wilayah Sungguminasa).
- g. Menunggu pengumuman pelunasan ONH dari DEPAG.

Dalam pelaksanaannya, pelunasan talangan haji bukan menggunakan angsuran melainkan dengan cara menabung. Untuk menabung nasabah bisa menggunakan tabungan TSM atau tabungan mabrur dengan mendebet dari saldo rekening tabungan mabrur. Hal ini yang membedakan produk dana talangan haji dengan produk pembiayaan lainnya. Pada produk pembiayaan lain, nasabah diharuskan mengembalikan pinjaman beserta tambahan margin yang telah ditentukan oleh Bank. Sedangkan pada produk dana talangan haji, nasabah hanya mengembalikan dana sebesar pinjamannya tanpa ada tambahan margin melainkan hanya dibebankan biaya *ujrah* saja.

Untuk jangka waktu pelunasan dana talangan haji, Bank Mandiri Syariah memberikan kelonggaran waktu maksimal sampai 3 tahun. Apabila tahun pertama nasabah belum bisa melunasi, maka nasabah akan mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk tahun kedua dan seterusnya sampai tahun ketiga. Dalam perpanjangan waktu pelunasan tersebut, nasabah dibebani biaya *ujrah*.

Namun, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Pusat pertanggal 1 April 2013 melarang seluruh bank baik konvensional maupun

syariah mengeluarkan produk talangan haji kecuali Bank Syariah Mandiri. Alasan ini diperkuat dengan penjelasan yang menerangkan bahwa produk talangan haji yang diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri sama sekali tidak memberatkan nasabah dikarenakan jangka waktu talangan haji masih lebih pendek dari masa tunggu keberangkatan haji. Jadi, batasan waktu untuk menabung menjadi 1 tahun. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa ujah setelah terjadinya perubahan mengenai masa batasan pembayaran talangan haji itu menjadi Rp2.850.000,- untuk semua jenis talangan haji regular, dan Rp.3.600.000,- untuk talangan haji plus.

Produk talangan ini telah banyak membantu masyarakat khususnya yang ingin melakukan ibadah haji namun belum memiliki dana. Hadirnya talangan haji telah memberikan semangat kepada masyarakat bahwa semua bisa untuk melaksanakan ibadah haji, khususnya saya secara pribadi.²¹

Hadirnya Bank Syariah Mandiri ini sedikit banyaknya memberikan dampak positif dilingkungan Sungguminasa ini, terkhusus dengan produk talangan haji yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan haji dengan landasan syariah yang dijelaskan untuk mempermudah masyarakat awam untuk mengerti bagaimana dan apa sebenarnya produk pembiayaan talangan haji itu sendiri.²²

²¹ Wawancara dengan ibu Hasnah (petani), selaku nasabah talangan haji BSM KCP Gowa, pada tanggal 4 Juni 2014.

²² Wawancara dengan ibu Syamsiah (Ibu Rumah Tangga), selaku nasabah talangan haji pada BSM KCP Gowa pada tanggal 14 Juni 2014.

C. Problem Penerapan Qardh Wal Ijarah dalam Dana Talangan Haji dan Analisisnya

Mengacu dari penjelasan diatas, setelah mendapat porsi haji nasabah tinggal menunggu pengumuman pemberangkatan dan melunasidana talangan yang diberikan pihak BSM. Namun dalam kenyataan dilapangan, banyak hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan.

Hambatan yang sering terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bisa saja terjadi sehingga bank harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

1. Analisis pembatalan haji karena tidak mampu membayar

Apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan nasabah tidak mampu melunasi sampai batas akhir jangka waktu (1 tahun), dari pihak BSM mempunyai tindakan dan kebijakan-kebijakan sendiri untuk menyelesaikan. Hal yang dilakukan BSM yaitu:

- a. Menagih ke pihak mitra BSM, apabila nasabah tersebut mendaftar melalui perantara mitra BSM.
- b. Menagih ke nasabah yang bersangkutan.
- c. Apabila sudah ditagih akan tetapi kondisi nasabah tersebut benar-benar tidak bisa melunasi, maka dengan terpaksa daripihak BSM akan membatalkan pemberangkatannya serta mengembalikan uang nasabah sebesar setoran yang sudah dilakukan.

2. Analisis pembatalan haji karena meninggal dunia

Sedangkan apabila terjadi pembatalan haji dikarenakan calon haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pembatalan pemberangkatan haji ke BSM melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat persetujuan dari Bank, surat permohonan tersebut diajukan ke DEPAG sekitar.

Dalam hal ini, pemberangkatan haji tidak bisa diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon haji meninggal dunia, dari pihak BSM akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris yang tertera saat perjanjian akad. Akan tetapi, dana tersebut bisa digunakan oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.²³

Untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah dilakukan beberapa analisa. Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam menganalisa sebagai berikut:

a. Karakter/*Character*

Karakter diartikan sebagai sifat atau watak nasabah pengambil pinjaman. Pengamatan karakter merupakan hal terpenting yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam melunasi pinjaman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tentang sifat-sifat pribadi, cara hidup, kelakuan sehari-hari dan keadaan keluarga calon nasabah.

²³Wawancara dengan Bapak Arif Wirabuana selaku Pelaksana Marketing Support khusus produk Dana Talangan Haji di BSM KCP Sungguminasa, 21 Mei 2014.

Pada produk dana talangan haji di BSM, calon nasabah yang berminat berasal dari semua lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas, karena pada dasarnya menunaikan ibadah haji tergantung panggilan diri dari pribadi masing-masing.

Dari semua lapisan masyarakat, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dalam hal ini pengamatan karakter calon nasabah sangat penting demi tercapainya tujuan bersama, sehingga tidak sampai terjadi adanya pembatalan pemberangkatan haji karena tidak melunasi pinjaman tersebut.

b. *Modal/Capital*

Modal merupakan suatu pengamatan tentang berapa jumlah besarnya modal/dana yang yang diperlukan oleh peminjam. Dengan mengetahui besar modal yang dibutuhkan maka penyaluran pinjaman akan sesuai sehingga tidak terjadi kesalahan. Untuk penyaluran pinjaman produk dana talangan haji dari BSM sebesar Rp 22.500.000,00 dan kekurangannya ditambahi oleh pihak nasabah sendiri. Dari pihak BSM menetapkan besarpinjaman senilai Rp 22.500.000, agar masyarakat yang belum mempunyai cukup uang dapat ikut menunaikan ibadah haji.

c. *Kemampuan/Capacity*

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal ini diukur dari tingkat perkembangan usahanya. Produk dana talangan haji berbeda dengan produk pembiayaan lainnya, karena dana yang dipinjamkan oleh bank bukan digunakan untuk usaha melainkan untuk mendaftar

ibadah haji. Jadi pengamatan yang dilakukan oleh pihak bank yaitu mengukur kemampuan calon nasabah dalam melunasi pinjaman serta kemantapan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.

d. *Keadaan/Condition*

Merupakan bagian terpenting dalam menganalisa calon nasabah karena kita dapat mengetahui kondisi nyata yang dialami nasabah. Sehingga pihak Bank akan lebih bijak dalam memberikan keputusan-keputusan yang berkaitan tentang pelunasan pinjaman calon nasabah haji.

e. *Jaminan/Collateral*

Besarnya jaminan yang diberikan peminjam kepada pihak Bank yaitu sebagai bentuk perwujudan dari *i'tikad* baik nasabah untuk mempertanggung jawabkan dana yang diterimanya dengan sebenar-benarnya. Pada produk dana talangan haji, nasabah tidak perlu memberikan jaminan/agunan kepada pihak Bank. Karena dana yang dipinjamkan oleh Bank sebagai dana talangan haji untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah diberikan waktu untuk melunasi maksimal 1 tahun dengan sistem menabung dan tanpa tambahan margin. Namun, apabila nasabah sampai batas waktu tersebut tidak bisa melunasi konsekuensi yang didapat yaitu dengan dibatalkannya pemberangkatan haji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan akad *qardh wal ijarah* pada produk dana talangan haji di BSM yaitu berupa dana pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah dan biaya sewa/*ujrah* sistem IT yang dimiliki BSM dibebankan kepada nasabah calon haji. Produk dana talangan haji di Bank Mandiri Syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh wal ijarah* yang diberikan kepada nasabah calon haji dalam rangka untuk mempermudah memperoleh nomor porsi haji. Jadi dengan adanya produk ini, masyarakat bisa menunaikan ibadah haji walaupun belum mempunyai cukup uang.
2. Dalam pelunasannya nasabah calon haji diberikan waktu maksimal 1 tahun, namun pada pelaksanaannya sering terjadi hambatan. Hambatannya yaitu seperti nasabah tidak bisa melunasi dana pinjaman, pembatalan pemberangkatan haji karena nasabah calon haji meninggal dunia sebelum pemberangkatan haji. Sedangkan hambatan pada produk dana talangan haji sendiri, yaitu masih ada masyarakat yang pro dan kontra, kurangnya dukungan dari para tokoh-tokoh, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

B. Saran

Beberapa saran yang penulis sampaikan kepada Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa, berupa:

1. Untuk ditingkatkan sosialisasi baik melalui media *interpersonal* (tokoh masyarakat, tokoh agama, dll), perguruan tinggi dan promosi melalui media elektronik maupun media cetak. Sosialisasi ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas mengenai produk dana talangan haji sehingga tidak terjadi pro dan kontra.
2. Mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai perbankan syariah yang diharapkan akan memberikan wawasan, keterampilan serta kualitas SDM yang dimiliki Bank Mandiri Syariah.
3. Pemasaran yang gencar terhadap produk-produk yang dimiliki Bank Mandiri Syariah KCP Sungguminasa khususnya produk dana talangan haji. Serta meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, nyaman, dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi ke-7, Jakarta; PT Raja Grafindo, 2004.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Antonio, Syafi'i M, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Aziz, Abdul dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, Jakarta; Puslitbang kehidupan keagamaan, 2007.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakara: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Bisri, Adib dan Munawwir, *Kamus Al Bisri Arab-Indonesia Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Brosur produk talangan haji BSM.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: PT. Qomari Prima Publisher, 2007.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, Jakarta: Gaung Persada, 2006.
- Hasan, Ali M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hammad, Nazih, *Mu'jam al-Mustahabat al-iqtishodiyah fi al-Lugha al_fugoha*, Al-ma'had Ali lil al-fiki al-Islami, 1995.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, cet ke-8, 2010.
- Mas'adi, Ghurfon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moeloeng J, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- PT. Bank Syariah Mandiri. *Buku Profil PT. Bank Syariah Mandiri*. 2013.
- PT. Bank Syariah Mandiri. *Buku Profil PT. Bank Syariah Mandiri*. 2014.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rifai, Moh. Et. Al., *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1990.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-10, 2010.
- Syafe'I, Rahmat, *Fikih Muamalah*, Jakarta: CV. Putra Persada, 1999.
- Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005.
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, cet.ke-1, 2006.
- Yusuf, Muhammad, dan Wiroso, *Bisnis Syariah edisi ke-2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Yakub, Hamzah, *Fikih Muamalah: Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Garfika, 2008.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nurul Fatwa, lahir 14 Juli 1992 di Ujung Pandang Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis adalah anak bungsu dari empat bersaudara, putri dari pasangan ayahanda H. Kafrawi Aman Manan, BA dan Ibunda Hj. St.Fachriah, S.Sos.

Penulis menamatkan pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri Mangkura Inpres Makassar pada tahun 2004. Setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Sungguminasa, dan tamat pada tahun 2007. Lalu kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan pada SMK 7 Makassar dan mengambil jurusan akuntansi, menyelesaikan studi SMK pada tahun 2010. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti penulis antarlain; pengurus OSIS SMK Negeri 7 Makassar Periode 2008-2009, Ketua Koordinator Publishing pada SEMC (Skaven English Meeting Club).

Prestasi yang pernah diraih dibidang akademik dan seni antara lain; juara I Presenter dalam Bahasa Asing se-Pelajar SMA di Makassar 2008, juara III lomba presenter tingkat pelajar SMK tahun 2009.

Pada tahun 2010 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam program Srata I (SI), dan pada tahun 2013 Jurusan Ekonomi Islam dialih statuskan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Pengalaman organisasi yang diikuti penulis antara lain; Anggota pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Seni Budaya eSA Universitas Alauddin Makassar dan Pengurus Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKEIS) 2011, dan sampai sekarang aktif sebagai anggota di FORKEIS.